



BADAN PENGARAH PAPUA

Laporan Kegiatan Papua Sehat BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat JANUARI 2025



1

Aspek Perencanaan

Rapat Koordinasi Tugas dan Fungsi BPP Tahun 2026

 20 Januari 2026 |  Gedung Keuangan Negara, Manokwari

Diskusi evaluasi kegiatan 2025 dan perencanaan 2026, koordinasi dengan BP3OKP se-Papua, Sekretariat BPP, Menyoroti pentingnya pelaporan transparan ke Wakil Presiden RI, perlunya rapat pleno untuk strategi jangka panjang 2026-2029, serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.



Pembentukan Sub Pokja Pelindungan dan Pemanfaatan Noken

 27 Januari 2026 |  Gedung Keuangan Negara, Manokwari

Diskusi pembentukan tim pelestarian Noken Papua untuk mengeluarkan dari status UNESCO Urgent Safeguarding List. Fokus pada inventarisasi, dokumentasi, dan pengembangan usaha Noken yang berkelanjutan.



✓ **CAPAIAN: Tersusunnya rencana aksi pelestarian Noken dengan koordinasi 7 wilayah adat**

2

Aspek Penganggaran

Forum Pimpinan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026

Evaluasi dan Penyelarasan Pelaksanaan APBN TA 2025-2026

📅 27 Januari 2026 | 📍 Ruang Kasuari, Manokwari

Evaluasi pelaksanaan anggaran 2025 dan penyelarasan komitmen pelaksanaan anggaran 2026. Memperkuat kolaborasi antara BP3OKP, Kanwil DJPb Papua Barat, dan KPA dalam pelaksanaan APBN berkualitas. Realisasi belanja pemerintah pusat di Papua Barat mencapai 97%.



Evaluasi RAP Otsus Kabupaten Teluk Bintuni

📅 30 Januari 2026 | 📍 Bappeda Teluk Bintuni

Penyelesaian RAP Otsus 2025



✓ **CAPAIAN: Penyelesaian dana Otsus 1% dan DBH Migas sebelum batas waktu 31 Januari**

3

Aspek Pelaksanaan (Bagian 1)

Koordinasi Kelembagaan & Pengawasan

Rapat dengan Kemendagri

📅 14 Jan | 📍 Kemendagri, Jakarta

Pembahasan Otsus bersama Kasubdit Otsus Kemendagri



Audiensi National Paralympic Committee

📅 21 Jan | 📍 Ruang Rapat Triton, GKN Lantai II, Arfai, Manokwari

Rapat audiensi diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Sekretariat Wakil Presiden Nomor B-34/KSN/SWP/KN.01.00/12/2025 tanggal 3 Desember 2025 terkait Usulan NPC Provinsi Papua Barat. Tindak lanjut pembangunan kantor sekretariat NPC permanen 2 lantai, Asrama dan stadion.



Arahan BP3OKP:

pendaftaran lembaga, penyelesaian administrasi pembebasan lahan, dan penyempurnaan dokumen proposal beserta RAB.

Audiensi Keluarga Nicodemus Orisu

📅 25 Jan | 📍 Manokwari

Diskusi perkembangan penyelesaian status pembayaran tanah dan hak kepemilikan Tanah/Bangunan milik Keluarga Nicodemus Orisu di area Bandara Rendani, Manokwari.



3 Aspek Pelaksanaan (Bagian 1)

Koordinasi Kelembagaan & Pengawasan

Rapat SHEK dengan KPK RI

📅 13 Jan | 📍 KPK RI, Jakarta

Koordinasi pengawasan program pembangunan Papua

Fokus Pembahasan:

- Penguatan tata kelola Dana Otsus
- Sinkronisasi perencanaan daerah dengan RIPP dan RAPP
- Peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk pencegahan penyimpangan
- Tantangan: lemahnya pelaporan dan pengawasan Dana Otsus
- Transformasi paradigma: Otsus sebagai kebijakan pembangunan menyeluruh
- Memperkuat legitimasi dan peran BPP sebagai mitra strategis



3 Aspek Pelaksanaan (Bagian 2)

Papua Produktif & Ekonomi

Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2025

📅 27 Januari 2026 | 📍 Hotel Swiss-bell Manokwari

BI meluncurkan LPI 2025 dengan tema 'Tangguh dan Mandiri'. Pembahasan penurunan pertumbuhan ekonomi Papua Barat akibat sektor pertambangan dan industri pengolahan.



AUDIENS BERSAMA KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Pembahasan Penyediaan Perumahan Layak Huni

📅 30 Januari 2026 | 📍 Indiyana Hotel, Teluk Bintuni

Evaluasi program perumahan masyarakat OAP. BP3OKP menyoroti rumah tidak layak huni dan menuntut transparansi dana Otsus untuk perumahan. Irene Manibuy Selaku Anggota BP3OKP Perwakilan Papua Barat berencana untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Ditjen Perumahan dan tim KPK bagian pencegahan, untuk memastikan program perumahan tepat sasaran dan mencegah praktik penyelewengan.



Audiensi Pembayaran Hak Suku Sebiar dari LNG Tangguh

📅 31 Januari 2026 | 📍 Teluk Bintuni

Penyelesaian hak atas 9 sumur migas yang belum terbayar dari total 15 sumur. Irene Manibuy selaku anggota BP3OKP Perwakilan Papua Barat, menekan perlunya penyelesaian hak atas sembilan sumur minyak dan gas yang belum terealisasi dari total lima belas sumur, di mana enam sumur sudah dibayar. BP3OKP mengarahkan akan ada pertemuan lanjutan, dan akan berkoordinasi Bersama BP Tangguh dan Bupati terkait hal tersebut



3

Aspek Pelaksanaan (Bagian 3)

Kegiatan Lainnya

Audiensi dengan KAPOLDA Papua Barat

📅 27 Januari 2026 | 📍 Polda Papua Barat

Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dengan Irjen Pol. Jhonny Edison Isir yang baru promosi menjadi Kepala Divisi Humas POLRI. Pembahasan dilanjutkan dengan isu keamanan, kesehatan dan pendidikan di Papua Barat, demi menciptakan Papua Barat yang aman, Kondusif dan sejahtera



Penandatanganan Penyelesaian RAP Teluk Bintuni

📅 30 Januari 2026 | 📍 Rumah Tamu Negara, Teluk Bintuni

Pernyataan pemerintah daerah siap menyelesaikan Amdal sebagai syarat program.

Audiensi Tim Pembangunan 3000 Perumahan

📅 31 Januari 2026 | 📍 Teluk Bintuni

Penerimaan proposal pembangunan 3000 perumahan untuk 10 distrik di Bintuni.



1. Penguatan Fasilitas Kesehatan Dasar

Penyediaan infrastruktur pendukung, rumah dinas tenaga medis, dan kendaraan operasional untuk PUSTU, Puskesmas, dan RS di daerah terpencil.

2. Implementasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

Menyediakan paket insentif, fasilitas memadai, dan sistem rotasi jelas bagi tenaga medis di 3T, serta implementasi Kartu Papua Barat Sehat.

3. Optimalisasi Kapal Rumah Sakit Terapung

Mengelola kapal RS sebagai UPTD dengan fungsi komprehensif untuk pelayanan luar gedung di daerah pesisir dan pedalaman.

4. Sistem Jaminan Kesehatan Daerah

Membentuk SJKD untuk mencakup pembiayaan tidak ditanggung BPJS termasuk biaya transportasi dan akomodasi pasien.

5. Pelayanan Kesehatan Mobile

Mengembangkan program mobile health services dengan fokus ANC ibu hamil dan penemuan dini kasus kesehatan.

4

Rekomendasi & Tindak Lanjut

1. Koordinasi Kelembagaan BP3OKP

Forum penguatan kelembagaan BP3OKP se-Papua dan roadmap strategis 2026-2029

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Mekanisme pelaporan jelas ke Wakil Presiden Republik Indonesia dan sistem penilaian kinerja BPP

3. Pelestarian Warisan Budaya

Implementasi program safeguarding Noken Papua menuju Representative List UNESCO

4. Penguatan Kerjasama dengan KPK RI Dalam Pencegahan Korupsi

Melanjutkan Koordinasi intensif dengan KPK RI untuk penguatan tata kelola dana Otsus.

5. Penguatan Koordinasi Keamanan dengan POLDA Papua Barat

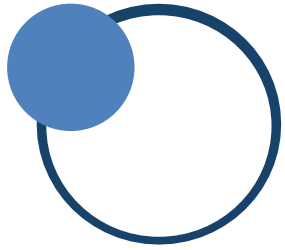
Mempertahankan Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan aparat Keamanan untuk mendukung stabilitas dan keamanan pelaksanaan program pembangunan di Papua Barat.

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan

Otonomi Khusus Papua

Perwakilan Provinsi Papua Barat

Komitmen bersama untuk percepatan pembangunan
Papua yang sehat, cerdas, produktif, dan damai



LAPORAN BULANAN

POKJA PAPUA PRODUKTIF

BPPP

BADAN PENGANTARA PAPUA



PERIODE JANUARI 2026

KEGIATAN-KEGIATAN STRATEGIS



INDIKATOR PEMBANGUNAN PAPUA PRODUKTIF

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



Anggota Pokja Papua Produktif BP3OKP Papua Barat hadir dalam kegiatan peluncuran laporan perekonomian Indonesia pada Rabu 28 Januari 2026, di Swiss BellHotel Manokwari.

Perekonomian Papua Barat triwulan III tahun 2025

- Perekonomian Papua Barat pada triwulan III tahun 2025 berkontraksi sebesar -0,13 (yoy), tidak lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya.
- Dari sisi sektoral, Lapangan Usaha (LU) Pertambangan dan industri pengolahan menjadi pemicu utama berkontraksinya ekonomi Papua Barat pada Triwulan III 2025. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar berasal dari Total Ekspor dan PMTB.

Outlook Perekonomian Papua Barat 2025

- ✓ **PERTAMBANGAN DAN INDUSTRI**; Struktur pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada 2025 masih didominasi sektor pertambangan dan industri pengolahan berbasis LNG, dengan laju pertumbuhan yang bergerak lebih stabil seiring proses normalisasi produksi dan tetap mencerminkan fundamental ekonomi yang kuat.
- ✓ **PERTANIAN**; La Niña lemah hingga awal 2026 berpotensi meningkatkan curah hujan di Papua Barat, yang mendukung ketersediaan air tanaman dengan tetap disertai risiko banjir dan gangguan produksi lokal. Program ketahanan pangan pemerintah diperkirakan menopang kinerja subsektor tanaman pangan.
- ✓ **KONSUMSI RUMAH TANGGA**; Pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada 2025 diperkirakan tetap ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang terjaga, seiring inflasi yang terkendali dalam sasaran nasional, didukung perbaikan pendapatan, penyaluran bantuan sosial, dan meningkatnya aktivitas ekonomi Papua Barat.

Prospek Peluang Perekonomian Papua Barat 2026

□ PERTANIAN

- ✓ Program ketahanan pangan berdampak pada perluasan area tanam dan target produksi beras dan jagung.
- ✓ Perluasan implementasi program MBG berpotensi untuk meningkatkan produksi pertanian untuk pasokan MBG.
- ✓ Realisasi Kerjasama Antar Daerah dgn Sulawesi Utara akan meningkatkan perdagangan perdagangan antar pulau.

□ KONSTRUKSI 2026

Proyek pembangunan pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak direncanakan mulai dibangun dan diproyeksikan menjadi sentra distribusi pupuk bagi Kawasan Timur Indonesia (KTI).

□ KONSUMSI RUMAH TANGGA

Penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIV di Kabupaten Manokwari berpotensi mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga di Papua Barat, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi selama pelaksanaan acara berskala nasional.



INDIKATOR PEMBANGUNAN PAPUA PRODUKTIF

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



Tantangan Perekonomian Papua Barat 2026

- ✓ Pada sisi hulu, masih terbatasnya pemanfaatan teknologi pada pertanian rakyat. Pada sisi hilir, hilirisasi produk pertanian/perikanan juga masih terbatas.
- ✓ Pada sisi investasi, Belum adanya sumber baru investasi besar. Prakiraan penurunan TKD pada tahun 2026 berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah daerah pada tahun 2026.
- ✓ Kesiapan SDM lokal untuk mendorong transformasi digital dan inovasi berbasis keunggulan daerah.

Rekomendasi

- ✓ Akademisi/Perguruan Tinggi merupakan Pengerak Pengetahuan dalam berbagai Riset pengembangan produk turunan komoditas lokal dan Pelatihan vokasi serta sertifikasi teknis
- ✓ Kemitraan Investor dan UMKM sebagai penggerak investasi dalam Penanaman modal di sektor hilir.
- ✓ Koperasi tani, kelompok nelayan, UMKM pengolahan menjadi bagian dari rantai nilai Pembangunan dan penggerak ekonomi local.
- ✓ Pemprov, Pemkab/kota, Bappeda, Dinas teknis, K/L selaku regulator, fasilitator Pembangunan yang Menyusun roadmap hilirisasi berbasis potensi daerah, menyediakan infrastruktur dasar dan menyalurkan insentif fiskal.

Kesimpulan Umum

Hilirisasi hanya dapat berkelanjutan bila dibangun di atas fondasi kolaborasi yang erat. Sinergi Pentahelix adalah arsitektur kebijakan pembangunan daerah masa depan: lintas sektor dan inklusif.

Kesimpulan Khusus

- ✓ Realisasi Kinerja APBN tahun 2025 menunjukkan kinerja yang solid;
- ✓ APBN ekspansif untuk mendukung program program prioritas Pemerintah serta merespon dinamika perekonomian agar tetap terjaga
- ✓ Program-program prioritas Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
- ✓ APBN beserta mesin pertumbuhan yang lain akan terus dioptimalkan perannya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi;
- ✓ APBN juga akan terus dioptimalkan perannya sebagai shock absorber dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian;
- ✓ Ke depan, tantangan kita bukan hanya menjaga APBN tetap sehat, tetapi memastikan APBN benar-benar bekerja: collecting more dengan adil, spending better dengan cerdas, dan membiayai pembangunan secara berkelanjutan.



INDIKATOR PEMBANGUNAN PAPUA PRODUKTIF

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



Anggota Pokja Papua Produktif di damping Anggota BP3OKP Perwakilan Papua Barat melakukan kunjungan kerja dalam rangka SHEK ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Teluk Bintuni Pada Jumat, 30 Januari 2024, dengan Agenda Penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat Papua

Pembahasan terutama terkait dengan program perumahan yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan rumah kecil dan penyelewengan dana bantuan. B3OKP Perwakilan Papua Barat menyoroti kondisi rumah-rumah yang tidak layak huni, bahkan di daerah penghasil sumber daya alam, serta menuntut transparansi dana Otonomi Khusus (Otsus). BP3OKP juga mengungkapkan upaya dalam mengatasi birokrasi dan masalah koordinasi antarlembaga, seperti protes dari provinsi terhadap standar rumah dan perbedaan kebijakan antara Kementerian Sosial dan Dinas Perumahan. Irene Manibuy Selaku Anggota BP3OKP Perwakilan Papua Barat berencana untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Ditjen Perumahan dan tim KPK bagian pencegahan, untuk memastikan program perumahan tepat sasaran dan mencegah praktik penyelewengan.

Situasi Perumahan di Papua

- ❖ Kondisi perumahan di Papua, khususnya di Wiriagar, sangat memprihatinkan, dengan banyak keluarga tinggal dalam kondisi yang tidak layak.
- ✓ Satu rumah di Wiriagar bisa dihuni oleh 8 keluarga dengan kondisi dinding yang rusak.
- ✓ Masyarakat Wiriagar hidup di atas sumber daya alam seperti minyak dan gas, namun tidak merasakan kesejahteraan.
- ❖ Adanya program bantuan perumahan dari pemerintah, namun implementasinya belum efektif dan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- ✓ Bantuan yang diterima sebesar Rp 32 miliar untuk program Khotus, menunjukkan adanya alokasi dana, tetapi penggunaannya perlu dievaluasi.
- ✓ Perbedaan ukuran rumah TYPE 45 dan TYPE 54 menjadi perdebatan, di mana masyarakat menginginkan TYPE 54 untuk rumah yang lebih layak, meskipun ada protes dari provinsi untuk menyeragamkan ke TYPE 45.



INDIKATOR PEMBANGUNAN PAPUA PRODUKTIF

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



Tantangan dan Hambatan

- ❑ Adanya intervensi dari berbagai pihak yang mempersulit proses pembangunan dan penyaluran bantuan perumahan.
- ✓ Anggota DPRK melakukan intervensi yang aneh-aneh, mengganggu proses kerja yang seharusnya fokus pada pembangunan.
- ✓ Terdapat masalah transparansi dana Otsus, yang menjadi perhatian pemuda setempat.
- ❑ Adanya praktik penjualan kembali bantuan barang kepada pendatang, yang mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat asli Papua.
- ✓ Barang bantuan seperti BBR dari TNI Sosial seringkali dijual kembali ke pendatang, sehingga pendatang mendapatkan rumah yang bagus.

Kebutuhan Mendesak

- ❑ Masyarakat di Wiriagar sangat membutuhkan rumah layak huni karena kondisi tempat tinggal yang memprihatinkan.
- ✓ Banyak keluarga tinggal dalam satu rumah dengan kondisi dinding yang rusak, menunjukkan ketidaklayakan hunian.
- ✓ Meskipun daerah tersebut kaya akan minyak dan gas, kesejahteraan masyarakatnya belum terwujud dalam bentuk perumahan yang layak.
- ❑ Adanya desakan agar rumah yang dibangun berukuran TYPE 54 untuk memastikan kenyamanan dan kelayakan, dibandingkan ukuran TYPE 45 yang dianggap terlalu kecil.
- ✓ Pihak provinsi protes terhadap ukuran TYPE 54 dan mengusulkan penyeragaman ke TYPE 45, padahal masyarakat menginginkan yang lebih besar.

Peran Bantuan Stimulan dan Kolaborasi

- ❑ Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau BS-BS menjadi salah satu opsi untuk membantu masyarakat membangun rumah.
- ✓ Bantuan ini mencakup biaya material dan upah kerja, namun membutuhkan tambahan dana dari BMD untuk kolaborasi.
- ✓ Adanya kesulitan dalam implementasi karena masyarakat Papua menginginkan rumah yang langsung jadi, bukan hanya bantuan material.
- ❑ Kerjasama antara berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial, Dinas Perumahan, dan Pemerintah Daerah, sangat penting untuk keberhasilan program.
- ✓ Program BBR dari TNI Sosial dan Kementerian Sosial perlu dikelola dengan baik agar tidak terjadi penjualan kembali bantuan.
- ✓ Perlu ada kebijakan yang melarang penjualan kembali barang bantuan agar tepat sasaran.



INDIKATOR PEMBANGUNAN PAPUA PRODUKTIF

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



Kendala Teknis dan Lapangan

Implementasi Program Bantuan

- Masyarakat Papua cenderung menginginkan rumah yang langsung jadi, bukan hanya bantuan material atau upah kerja.
- ✓ Ini menjadi kendala bagi program bantuan stimulan yang hanya menyediakan material dan upah.
- ✓ Perlu ada penyesuaian program agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat.
- Adanya praktik penjualan kembali barang bantuan kepada pendatang, yang merugikan masyarakat asli.
- ✓ Ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam penyaluran bantuan.
- ✓ Kebijakan yang melarang penjualan kembali barang bantuan harus diterapkan secara tegas.

Hambatan Birokrasi dan Keuangan

- Proses penganggaran dan alokasi dana yang terlambat, seperti anggaran 2026, menunjukkan adanya masalah birokrasi.
- ✓ Keterlambatan ini dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan.
- ✓ Perlu ada upaya untuk mempercepat proses penganggaran dan alokasi dana.
- Perdebatan tentang ukuran rumah (TYPE 45 vs. TYPE 54) menunjukkan adanya ketidaksepahaman antara pemerintah provinsi dan masyarakat.
- ✓ Ini dapat menghambat proses persetujuan dan pelaksanaan proyek perumahan.
- ✓ Perlu ada dialog dan kesepahaman agar rumah yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Prioritas Perumahan Layak Huni

- Prioritas utama adalah menyediakan perumahan layak huni bagi masyarakat Papua, terutama di daerah-daerah yang sangat membutuhkan seperti Wiriagar.
- ✓ Kondisi perumahan yang tidak layak huni harus segera diatasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- ✓ Ukuran rumah yang lebih besar seperti TYPE 54 harus dipertimbangkan untuk memastikan kenyamanan dan kesejahteraan penghuninya.

Transparansi dan Akuntabilitas

- Transparansi dalam pengelolaan dana Otsus dan program bantuan perumahan harus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan publik.
- ✓ Semua proses dan data terkait harus tersedia by system agar dapat diakses oleh masyarakat.
- ✓ Intervensi dan tekanan dari pihak-pihak tertentu harus dihindari agar program dapat berjalan sesuai rencana.



INDIKATOR PEMBANGUNAN PAPUA PRODUKTIF

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



BUTIR-BUTIR TINDAKAN

- ✓ Menyelenggarakan pertemuan dengan Dirjen Perumahan untuk membahas strategi pembangunan perumahan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
- ✓ Mengkaji ulang kebijakan ukuran rumah (TYPE 45 dan TYPE 54) agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kelayakan hunian yang optimal.
- ✓ Memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bantuan perumahan dan menerapkan kebijakan yang ketat untuk mencegah penjualan kembali barang bantuan.
- ✓ Meningkatkan koordinasi antara Kementerian Sosial, Dinas Perumahan, dan Pemerintah Daerah untuk memastikan program bantuan berjalan sinergis dan efektif.
- ✓ Mempercepat proses penganggaran dan alokasi dana untuk program perumahan, seperti anggaran 2026, agar tidak menghambat pelaksanaan proyek.



KEGIATAN STRATEGIS BERSAMA

1

MONEV RAP OTSUS DAN TANTANGAN ANGGARAN KABUPATEN BINTUNI

Anggota Pokja Papua Produktif didampingi langsung oleh Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat (**Irene Manibuy**) melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Anggaran Otsus dan tantangan dalam mengelola anggaran Otsus, ke Kantor BAPPEDA Kabupaten Teluk Bintuni, pada akhir Januari 2026.

Pemerintah Kabupaten Bintuni mengakui adanya keterlambatan dalam penyiapan, penyusunan, dan penyerapan RAP Otsus 2025 yang menyebabkan sisa anggaran cukup besar dari DBH Migas, Dana Spesifik Block Grant, dan DTI. RAP Otsus seharusnya sudah selesai sebelum tanggal 30 Januari tahun ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti kurangnya pelatihan bagi OPD, masalah interoperabilitas sistem antara SIPD, dan SIKD, serta masalah negative list di SIKD yang berbeda antara tingkat kabupaten dan provinsi. Selain itu, ada kendala teknis seperti sistem yang eror selama dua hari pada 8-9 Januari 2025 sehingga menghambat input data.

Pemerintah Kabupaten Bintuni juga mengalami pemotongan DBH dan DAU sebesar Rp820 miliar, sehingga total dana mereka turun dari Rp3,2 triliun menjadi Rp2,4 triliun. Defisit anggaran dan banyaknya tagihan yang belum terbayar pada 2025, termasuk Rp280 miliar utang tahun 2025, mendorong pemerintah daerah untuk segera menetapkan APBD 2026. Ibu Irene Manibuy dari BP3OKP Perwakilan Papua Barat menekankan pentingnya menyelesaikan APBD sebelum 31 Januari untuk menghindari pemotongan DAU sebesar 25%. Ia juga mengungkapkan bahwa banyak dokumen yang diminta oleh provinsi, seperti Amdal dan surat hibah, membutuhkan waktu lama untuk disiapkan, sehingga memperlambat proses. Ada pula kekecewaan terhadap sistem yang menolak program prioritas daerah seperti master plan bandara dan pelabuhan, padahal sudah sesuai dengan RAPP dan dokumen perencanaan daerah.

Untuk mengatasi masalah kekurangan dana dan tunggakan pembayaran, pemerintah Kabupaten Bintuni sedang menjajaki opsi pinjaman bank dan kerja sama CSR dengan LNG Tangguh serta Genting Oil. Di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah berencana mengalokasikan dana Otsus untuk biaya gaji tenaga medis dan pendidikan. Program seperti sekolah sepanjang hari dan asrama sekolah di wilayah pesisir juga diusulkan untuk mengatasi masalah akses pendidikan dan permukiman bagi siswa.



KEGIATAN STRATEGIS BERSAMA

2

MONEV RAP OTSUS DAN TANTANGAN ANGGARAN KABUPATEN BINTUNI

❑ Keterlambatan dan Tantangan

- ❖ Keterlambatan dalam penyiapan RAP Otsus berdampak pada penyerapan anggaran
- ✓ Keterlambatan penyiapan RAP dan penyusunan serta penyerapan mengakibatkan silpa atau dana Otsus yang cukup besar, baik dari DBH Migas maupun dari tiga sumber dana spesifik lainnya, yaitu Block Grant dan DTI. RAP Otsus baru masuk pada bulan Mei di tahun 2025, yang sangat lambat
- ✓ Pemerintah daerah berupaya menyelesaikan RAP Otsus pada bulan Januari tahun ini untuk menghindari keterlambatan.

❑ Keberhasilan dan Tantangan

- ❖ Penyelesaian dana Otsus 1% dan DBH Migas telah selesai
- ✓ Dana Otsus 1% sudah berhasil diselesaikan, menandai kemajuan yang signifikan
- ✓ DBH Migas sudah berhasil diselesaikan.

❑ Harapan dan Kebijakan

- ✓ Harapan untuk kebijakan yang lebih fleksibel dari pemerintah pusat dan provinsi
- ✓ Pemerintah daerah berharap DJPK dapat membantu mediasi dengan provinsi terkait dokumen yang sulit dilengkapi
- ✓ Pentingnya dukungan agar RAP Otsus dapat segera disahkan sebelum 31 Januari untuk menghindari pemotongan DAU
- ✓ Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menjadi taruhan jika utang tidak segera diselesaikan

❑ Tindak Lanjut

- ✓ Menghubungi Ibu Tias (DJPK): Melakukan koordinasi dengan Ibu Tias dari DJPK untuk membahas permasalahan negative list dan kelonggaran kebijakan, serta menyampaikan kendala dokumen yang di luar kewenangan daerah seperti amdal dan surat hibah pelabuhan
- ✓ Membuat Surat Pernyataan: Menyiapkan surat pernyataan dari pemerintah daerah mengenai kesanggupan menyelesaikan dokumen-dokumen yang tertunda (contoh: Amdal untuk pelabuhan Babo) dalam batas waktu tertentu untuk meyakinkan pihak provinsi
- ✓ Mendapatkan Berita Acara Penyelesaian RAP Otsus: Mengupayakan untuk mendapatkan berita acara penyelesaian RAP Otsus hari ini juga agar penetapan APBD dapat dilakukan sebelum batas waktu 31 Januari
- ✓ Mengecek Selisih Kurang/Lebih Bayar DBH: Melakukan pengecekan ulang selisih kurang bayar atau lebih bayar DBH tahun 2024 dan 2025 agar dapat diajukan kepada DJPK
- ✓ Memaksimalkan CSR LNG Tangguh dan Ginting Oil: Berkoordinasi dengan LNG Tangguh dan Ginting Oil untuk mendapatkan bantuan CSR guna menambah unit perumahan
- ✓ Mengimplementasikan Program Sekolah Sepanjang Hari: Mendorong implementasi program sekolah sepanjang hari dan pembangunan asrama sekolah untuk meningkatkan akses pendidikan
- ✓ Melaporkan ke Wakil Presiden: Melaporkan kendala kebijakan dan sistem yang terjadi kepada Wakil Presiden agar ada kelonggaran kebijakan yang diberikan kepada daerah
- ✓ Menghubungi Tim KPK: Mengadakan sosialisasi dengan tim KPK terkait penggunaan dana Otsus dan tagging barang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas



KEGIATAN STRATEGIS BERSAMA

1

HAK SUKU SEBIAR YANG BELUM TERBAYARKAN DARI LNG TANGGUH

Anggota Pokja Papua Produktif didampingi langsung oleh Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat (Irene Manibuy) melakukan Audiens pada akhir Januari 2026, dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Suku Sebiar (LPMS), Audiens tersebut dalam rangka “Hak Suku Sebiar yang belum terbayar dari LNG Tangguh”

Latar Belakang

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Suku Sebiar (LPMS) mengeluhkan pembayaran hak atas sembilan sumur minyak dan gas yang belum terealisasi dari total lima belas sumur, di mana enam sumur sudah dibayar senilai 23,4 miliar pada Desember 2023 di era Gubernur Dominggus Mandacan. Pihak LPMS sudah melakukan berbagai upaya, termasuk audiensi dengan DPD RI, difasilitasi oleh Pak Filep, dan telah kembali ke Jakarta pada bulan Agustus untuk menemui perwakilan SKK Migas, ESDM, dan BP Tangguh, namun belum ada keputusan. Kendala dana menghambat kehadiran mereka pada pertemuan berikutnya dan pertemuan dengan gubernur dan bupati. LPMS berharap Ibu dapat membantu mengoordinasikan dengan bupati terkait proposal mereka yang belum terealisasi, serta menyampaikan permasalahan ini kepada pihak terkait di Jakarta, termasuk Presiden, dengan melampirkan surat-surat dan data-data pendukung. Mereka juga menyebutkan adanya 13 sumur di tahap 3 dan 144 sumur di tahap 4 (Februari 2024) yang juga belum terbayar, dan menekankan bahwa seluruh suku besar di enam distrik, berhak menikmati hasil tersebut. Mereka juga meminta Ibu untuk berkoordinasi dengan Bupati terkait rekomendasi atas permintaan mereka.

Irene Manibuy selaku anggota BP3OKP Perwakilan Papua Barat, menekan perlunya penyelesaian hak atas sembilan sumur minyak dan gas yang belum terealisasi dari total lima belas sumur, di mana enam sumur sudah dibayar. BP3OKP mengarahkan aka nada pertemuan lanjutan, dan akan berkoordinasi Bersama BP Tangguh dan Bupati terkait hal tersebut.

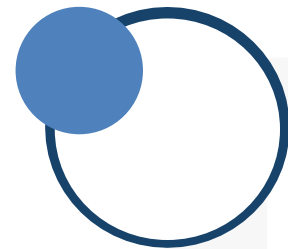
Permasalahan Hak Masyarakat

- ❑ Jumlah Sumur dan Pembayaran
- ❖ Sumur yang telah dibayar
 - ✓ Dari total 15 sumur, 6 sumur telah dibayar.
 - ✓ Pembayaran terakhir terjadi pada Desember 2023 dengan nilai 23,4 miliar.
- ❖ Sumur yang belum dibayar
 - ✓ Masih ada 9 sumur yang belum dibayar, dengan estimasi nilai 90 miliar.
 - ✓ Selain itu, terdapat tren 3 dengan 13 sumur dan tren 4 dengan 144 sumur di Mogotira yang juga belum dibayar.
- ❖ Durasi permasalahan
- ✓ Masalah ini telah berlangsung dari tahun 2009 hingga 2025, yaitu selama 16 tahun.

Action Items

- ✓ LPMS akan menyiapkan surat-surat dan data terkait permasalahan 9 sumur yang belum terbayar.
- ✓ LPMS akan mengumpulkan semua data dan surat yang diminta oleh BP3OKP PB.
- ✓ LPMS akan bertemu kembali dengan BP3OKP PB di kantor untuk menyerahkan data dan berdiskusi lebih lanjut.
- ✓ LPMS akan mengajukan surat permohonan audiensi kepada Bupati Kabupaten Teluk Bintuni atau bertemu secara pribadi untuk menyampaikan permasalahan tersebut.
- ✓ BP3OKP PB akan berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni untuk membantu disposisi proposal LPMS dan membuat rekomendasi.





TERIMA KASIH

BADAN PENGARAH PAPUA

